



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2017/Periodik - 2016)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI)  
**UNIT KERJA** : DEPUTI BIDANG KONSERVASI ARSIP  
**SUB UNIT KERJA** : DEPUTI BIDANG KONSERVASI ARSIP

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **M. Taufik**
2. Jabatan : **DEPUTI BIDANG KONSERVASI ARSIP**
3. NHK : **95502**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	----
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	<b>149.500.000</b>
1. MOTOR, Yamaha Solo Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
2. MOTOR, Yamaha Solo Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000		
3. MOBIL, Toyota New Avanza Veloz Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	<b>166.170.656</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	<b>315.670.656</b>

**III. HUTANG** Rp. **36.772.296**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **278.898.360**

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **TIDAK LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **18 Januari 2019**.



4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

